

Kajian Kinerja Pembangunan *Smart Governance* dengan Pendekatan *Importance Performance Analysis*

Avina Husna*, Ernady Syaodih

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*husnaavina@gmail.com, ernadysyaodih@gmail.com

Abstract. Bogor City as a hinterland city is one of the cities included in the 'First 100 Cities Movement Towards a Smart City in Indonesia' as a pilot project since 2017-2021. The construction plan is stated in the Bogor City Smart City Masterplan document for 2017-2021. One of the important factors in the success of smart cities is smart governance. Smart governance is government governance that aims to improve government performance through the use of ICT. This study focuses on governance problems that occur in Bogor City, especially in Central Bogor subdistrict. Where there are several problems such as inactive sub-district government websites, publication of government agency performance reports (LAKIP) that are not updated, and so on. So that this study was prepared with the aim of measuring the achievements of smart governance development based on 14 indicators synthesized from journal sources and smart city masterplan documents. This research uses a mix method approach method with a descriptive research method. The analysis method used is an IPA (Importance Performance Analysis) analysis to measure the level of performance and the level of community expectations for the development of smart governance and a descriptive analysis to explain the results of the IPA analysis. Based on the analysis, it is known that development achievements based on the level of suitability of smart governance development in Central Bogor subdistrict reached a score of 84.19%, which means that the government's performance in general is considered not in accordance with community expectations so improvements need to be made to improve government performance.

Keywords: *Smart Governance, IPA Analysis, Performance, Importance.*

Abstrak. Kota Bogor sebagai kota penyangga ibu kota negara merupakan salah satu kota yang termasuk dalam 'Gerakan 100 Kota Pertama Menuju Smart City di Indonesia' sebagai pilot project sejak tahun 2017-2021. Rencana pembangunannya tercantum dalam dokumen Masterplan Smart City Kota Bogor Tahun 2017-2021. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan smart city adalah smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui pemanfaatan TIK. Kajian ini berfokus pada permasalahan tata kelola pemerintahan yang terjadi di Kota Bogor khususnya di Kecamatan Bogor Tengah. Dimana terdapat beberapa permasalahan seperti website pemerintah kecamatan yang tidak aktif, publikasi laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang tidak diperbarui, dan sebagainya. Sehingga penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengukur capaian pembangunan smart governance yang didasarkan pada 14 indikator yang disintesis dari sumber jurnal dan dokumen masterplan smart city. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan mix method dengan metode penelitian deskriptif. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis IPA (Importance Performance Analysis) untuk mengukur tingkat kinerja dan tingkat harapan masyarakat terhadap pembangunan smart governance dan analisis deskriptif untuk menjelaskan hasil dari analisis IPA. Berdasarkan analisis IPA, diketahui bahwa capaian pembangunan berdasarkan tingkat kesesuaian pembangunan smart governance di Kecamatan Bogor Tengah mencapai skor 84,19% yang artinya kinerja pemerintah secara umum dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Kata Kunci: *Smart Governance, Analisis IPA, Kinerja, Harapan.*

A. Pendahuluan

Kota sebagai sebuah sistem kompleks terdiri dari banyak komponen yang saling berhubungan, dan ketika kota tumbuh dan berkembang dapat menimbulkan berbagai dampak dari segi sosial, ekonomi, hingga lingkungan [1]. Untuk mengatasi hal tersebut, para praktisi mencari solusi berupa sebuah pendekatan baru dalam perencanaan kota yang dikombinasikan dengan teknologi sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup serta kesejahteraan kota di masa depan, yaitu *smart city*.

Dalam mengimplementasikan konsep *smart city*, faktor penting dalam keberhasilan *smart city* adalah *smart governance* [2]. *Smart governance* merupakan tata kelola pemerintah dengan tata kelola birokrasi yang cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan inovatif melalui kombinasi pemanfaatan perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta tata kelola yang kolaboratif [3].

Kota Bogor termasuk salah satu kota di Indonesia yang menjadi *pilot project* dalam ‘Gerakan 100 Kota Pertama Menuju *Smart City* di Indonesia. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Bogor ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Bogor juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabekpunjur. Dalam RPJPD Kota Bogor, disebutkan misi ke-4 pembangunan Kota Bogor adalah mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Misi tersebut sejalan dengan konsep *smart governance*.

Menurut Shabrinawati dan Yuliastuti [4] dalam penelitiannya disimpulkan bahwa optimalisasi penerapan *smart governance* tergantung pada lokasi geografis wilayah, dimana desa-desa yang berada di pusat keramaian atau pusat pemerintahan dinilai lebih optimal dalam menerapkan *smart governance*. Di Kota Bogor, pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Bogor Tengah. Visi dari Kecamatan Bogor Tengah yaitu “Mewujudkan Kecamatan dengan Pelayanan Prima dan Sinergitas Pemberdayaan Masyarakat”. Dimana untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Misi Kecamatan Bogor Tengah, yaitu diantaranya mewujudkan aparatur yang berdasarkan *good governance*, mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Meskipun begitu, masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pengembangan *smart governance* di Kecamatan Bogor Tengah. Diantaranya adalah *website* pemerintah kecamatan yang tidak aktif, dimana berita yang terakhir diperbarui berasal dari tahun 2020. Publikasi laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang dipublikasi di *website* kecamatan juga tidak diperbarui, dimana hanya terdapat LAKIP Tahun 2017. Oleh karena itu disusun penelitian mengenai kinerja pemerintah dalam pembangunan *smart governance* dengan judul ‘Kajian Kinerja Pembangunan *Smart Governance* dengan Pendekatan *Importance Performance Analysis*’.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana capaian pembangunan *smart governance* di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor?”. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan *smart governance*. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur capaian pembangunan *smart governance* serta menentukan urutan prioritas pembangunan *smart governance* ke depannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dari penelitian ini adalah teridentifikasinya tingkat kinerja pembangunan *smart governance* dan tingkat harapan masyarakat terhadap pembangunan *smart governance* di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan studi dalam penelitian ini adalah metode pendekatan campuran (*mix method*) yaitu kuantitatif dan kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis IPA dan analisis deskriptif.

Untuk analisis IPA, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling* dengan populasi masyarakat Kecamatan Bogor Tengah berusia 15-64 tahun berjumlah 67.376 jiwa dan diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Sedangkan untuk analisis deskriptif, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pihak Pemerintah

Kecamatan Bogor Tengah dan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas yang sesuai dengan variabel penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pengumpulan data primer melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi serta pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, survei data instansional, dan internet.

Metode analisis IPA terbagi menjadi perhitungan tingkat kesesuaian dan penentuan kuadran IPA. Keduanya menggunakan nilai rata-rata dari tingkat kinerja dan tingkat harapan masyarakat untuk masing-masing variabel.

$$Tki = \frac{\sum Xi}{\sum Yi} \times 100\%$$

Keterangan:

Tki = Tingkat Kesesuaian

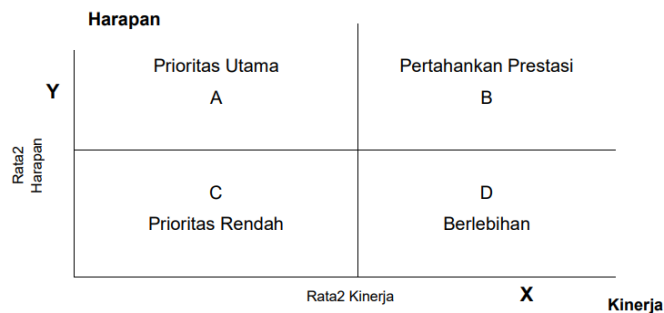
Yi = Skor Penilaian Harapan

Xi = Skor Penilaian Kinerja

Setelah dihitung tingkat kesesuaian, kategori tingkat kesesuaian yang terbagi menjadi kategori sebagai berikut.

1. Tingkat kesesuaian > 100% artinya kinerja pemerintah sangat sesuai dengan harapan masyarakat
2. Tingkat kesesuaian = 100% artinya kinerja pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat
3. Tingkat kesesuaian < 100% artinya kinerja pemerintah belum sesuai dengan harapan masyarakat

Adapun untuk kuadran IPA, sumbu X mewakili tingkat kinerja sedangkan sumbu Y mewakili tingkat harapan masyarakat. Maka akan didapat hasil berupa empat kuadran sesuai gambar berikut:



Gambar 1. Kuadran IPA

Berikut adalah variabel penelitian yang merupakan indikator *smart governance* yang disintesis dari 5 sumber.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Sumber				
	<i>Masterplan Smart City Kota Bogor</i> (2017) [3]	Annisah (2017) [5]	Eniyati et al. (2017) [6]	Lazaroiu & Roscia (2012) dalam Eniyati et al (2017) [6]	Cohen (2012) dalam Herdiyanti et al (2019) [7]
Pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat	V	V	V	V	

Variabel	Sumber				
	<i>Masterplan Smart City Kota Bogor</i> (2017) [3]	Annisah (2017) [5]	Eniyati et al. (2017) [6]	Lazaroiu & Roscia (2012) dalam Eniyati et al (2017) [6]	Cohen (2012) dalam Herdiyanti et al (2019) [7]
Pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan		V	V	V	
Pelayanan administrasi yang mudah diakses masyarakat	V	V			
Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan dan jasa pokok	V				
Prosedur pelayanan publik terintegrasi secara <i>online</i>		V	V	V	V
Ketersediaan WiFi di tempat publik					V
Ketersediaan sensor keamanan (CCTV) di tempat publik					V
Pengelolaan pengaduan masyarakat		V	V		
Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, akuntabilitas dan transparansi	V	V	V	V	
Mekanisme perencanaan yang dapat diakses masyarakat		V	V	V	
Penyediaan <i>open data</i>		V		V	V
Sistem informasi kebijakan pemerintah yang mudah diakses masyarakat	V	V		V	
Kerukunan antar organisasi keagamaan			V		
Pelestarian organisasi seni dan kebudayaan			V		

Sumber: Jurnal Penelitian yang Sudah Diolah, 2022.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tingkat Kesesuaian

Pada penelitian ini, perhitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengukur capaian pembangunan *smart governance* melalui perbandingan antara tingkat harapan masyarakat dan tingkat kinerja pemerintah. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden dengan total 70 atribut pernyataan untuk 14 indikator, maka didapatkan nilai yang telah diambil berupa rata-rata untuk menentukan tingkat kesesuaian berdasarkan kinerja dan harapan setiap indikator. Berikut adalah hasil perhitungan tingkat kesesuaian pada Tabel 1.

Tabel 2. Tingkat Kesesuaian Kinerja Pemerintah dan Harapan Masyarakat

Indikator	Kinerja	Harapan	Tki (%)	Keterangan
Pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat	3,06	3,70	82,70	Kinerja belum sesuai harapan
Pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan	3,08	3,62	85,08	Kinerja belum sesuai harapan
Pelayanan administrasi yang mudah diakses masyarakat	3,18	3,75	84,80	Kinerja belum sesuai harapan
Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan dan jasa pokok	3,25	3,79	85,75	Kinerja belum sesuai harapan
Prosedur pelayanan publik terintegrasi secara online	3,30	3,80	86,84	Kinerja belum sesuai harapan
Ketersediaan WiFi di tempat publik	2,96	3,67	80,65	Kinerja belum sesuai harapan
Ketersediaan sensor keamanan (CCTV) di tempat publik	3,10	3,81	81,36	Kinerja belum sesuai harapan
Pengelolaan pengaduan masyarakat	2,96	3,75	78,93	Kinerja belum sesuai harapan
Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, akuntabilitas dan transparansi	3,06	3,76	81,38	Kinerja belum sesuai harapan
Mekanisme perencanaan yang dapat diakses masyarakat	3,10	3,77	82,23	Kinerja belum sesuai harapan
Penyediaan open data	3,13	3,69	84,82	Kinerja belum sesuai harapan
Sistem informasi kebijakan pemerintah yang mudah diakses masyarakat	3,30	3,77	87,53	Kinerja belum sesuai harapan
Kerukunan antar organisasi keagamaan	3,50	3,95	88,61	Kinerja belum sesuai harapan
Pelestarian organisasi seni dan kebudayaan	3,43	3,90	87,95	Kinerja belum sesuai harapan
Total	44,41	52,73	1178,66	
Rata-rata	3,17	3,77	84,19	Kinerja belum sesuai harapan

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022.

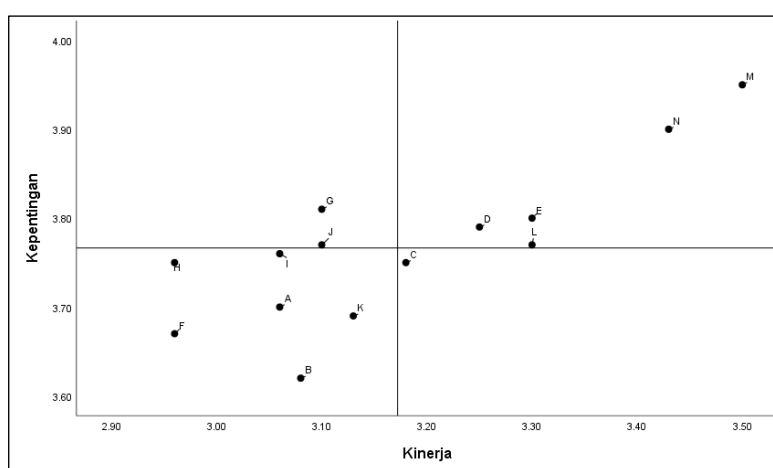
Diketahui bahwa untuk hasil tingkat kesesuaian kinerja dan harapan masyarakat untuk *smart governance* di Kecamatan Bogor Tengah, rata-rata nilai persentase mencapai angka 84,19%. Dimana artinya kinerja dari masing-masing indikator tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Untuk nilai persentase paling besar yaitu pada indikator kerukunan antar organisasi keagamaan dengan Tki sebesar 88,61%. Adapun untuk nilai persentase paling kecil yaitu pada indikator pengelolaan pengaduan masyarakat dengan Tki sebesar 78,93%.

Indikator pengelolaan pengaduan masyarakat memiliki nilai persentase paling kecil

karena berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Bogor Tengah, penggunaan aplikasi pengaduan masyarakat SiBadra masih belum maksimal. Indikator kerukunan antar organisasi keagamaan memiliki nilai persentase paling tinggi karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dikatakan bahwa terdapat kerukunan umat beragama yang baik. Dimana tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama di Kecamatan Bogor Tengah.

Kuadran IPA

Setelah diketahui rata-rata nilai untuk setiap indikator *smart governance*, selanjutnya dilakukan penentuan kuadran IPA untuk menentukan prioritas penanganan untuk pembangunan *smart governance* yang terbagi menjadi 4 bagian. Yaitu kuadran A, B, C, dan D. Dimana nilai tengah dari sumbu X adalah nilai rata-rata tingkat kinerja dan nilai tengah sumbu Y adalah nilai rata-rata dari tingkat harapan masyarakat. Nilai tengah untuk sumbu X atau tingkat kinerja yaitu 3,17 dan nilai tengah untuk sumbu Y atau tingkat harapan masyarakat yaitu 3,77. Berikut adalah gambar hasil kuadran IPA untuk pembangunan *smart governance* di Kecamatan Bogor Tengah.



Gambar 2. Hasil Kuadran IPA

Berdasarkan hasil analisis dalam diagram kartesius pengukuran tingkat kinerja dan tingkat harapan masyarakat diatas, maka dapat diinterpretasikan hasilnya sebagai berikut:

1. Kuadran A (*concentrate this*)

Kuadran A menunjukkan prioritas utama untuk diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya oleh pemerintah, dimana dalam kuadran ini terdapat indikator yang memiliki tingkat harapan yang tinggi dari masyarakat (*high importance*) namun kinerja dari pemerintah masih belum maksimal (*low performance*). Beberapa indikator yang termasuk ke dalam kuadran A ini antara lain:

- Ketersediaan sensor keamanan (CCTV) di tempat publik
- Mekanisme perencanaan yang dapat diakses masyarakat

2. Kuadran B (*keep up the good work*)

Kuadran B menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki tingkat harapan yang tinggi dari masyarakat (*high importance*) dan juga kinerja pemerintah juga dinilai telah baik (*high performance*) untuk setiap indikator tersebut sehingga harus dipertahankan kinerjanya oleh pemerintah. Beberapa indikator dalam kuadran B ini antara lain:

- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan dan jasa pokok
- Prosedur pelayanan publik terintegrasi secara online
- Sistem informasi kebijakan pemerintah yang mudah diakses masyarakat
- Kerukunan antar organisasi keagamaan
- Pelestarian organisasi seni dan kebudayaan

3. Kuadran C (*low priority*)

Kuadran C menunjukkan beberapa indikator yang memiliki tingkat harapan masyarakat yang rendah (*low importance*) serta kinerja dari pemerintah juga belum maksimal (*low performance*). Sehingga pemerintah tidak perlu memprioritaskan faktor-faktor tersebut. Beberapa indikator yang termasuk kedalam kuadran ini antara lain:

- Pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat
- Pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan
- Ketersediaan WiFi di tempat publik
- Pengelolaan pengaduan masyarakat
- Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, akuntabilitas dan transparansi
- Penyediaan *open data*

4. Kuadran D (*possible overkill*)

Kuadran ini menunjukkan indikator yang memiliki tingkat harapan masyarakat yang rendah (*low importance*) namun kinerja pemerintah dianggap telah baik (*high performance*) untuk setiap indikator sehingga pemerintah dapat mengalihkan alokasi sumber daya agar diutamakan pada faktor yang masuk ke dalam kuadran A atau kuadran B. Indikator yang termasuk kedalam kuadran ini adalah:

- Pelayanan administrasi yang mudah diakses masyarakat

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan tingkat kesesuaian, diketahui capaian pembangunan *smart governance* di Kecamatan Bogor Tengah memiliki skor 84,19% yang artinya kinerja dari masing-masing indikator *smart governance* belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
2. Kinerja pembangunan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat ini ditandai dengan masih terdapat permasalahan pada beberapa variabel *smart governance* antara lain sebagai berikut:

Penyerapan aspirasi masyarakat yang belum terlaksana secara menyeluruh

 - Belum optimalnya pelaksanaan monitoring penyediaan kebutuhan bahan dan jasa pokok
 - Jumlah titik dan penyebaran WiFi publik yang belum maksimal dan merata
 - Ketersediaan CCTV yang terbatas di kantor pemerintah dan tempat publik
 - Pengelolaan pengaduan masyarakat yang belum maksimal
 - Proses pendekatan perencanaan yang belum dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan masyarakat
 - Masih adanya keterbatasan akses data publik melalui *website* pemerintah
 - Belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung terciptanya tata kelola birokrasi yang adil, akuntabel, dan transparan.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:
 - Kurangnya anggaran untuk pembangunan *smart governance* dari segi infrastruktur fisik dan non fisik
 - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program dan kegiatan yang berkaitan dengan *smart governance*
 - Belum optimalnya kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan *smart governance*
4. Upaya peningkatan yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja pembangunan *smart governance* antara lain adalah:
 - Menetapkan produk hukum terkait pembangunan *smart governance* pada setiap komponen aspek
 - Menyusun program pembangunan untuk peningkatan pembangunan *smart governance*
 - Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program untuk pembangunan *smart governance*

- Mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan *smart governance*
- 5. Adapun urutan prioritas pembangunan *smart governance* berdasarkan hasil kuadran IPA adalah sebagai berikut:
 - Ketersediaan sensor keamanan (CCTV) di ruang publik (kuadran A)
 - Mekanisme perencanaan yang dapat diakses masyarakat (kuadran A)
 - Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan dan jasa pokok (kuadran B)
 - Prosedur pelayanan publik terintegrasi secara online (kuadran B)
 - Sistem informasi kebijakan pemerintah yang mudah diakses masyarakat (kuadran B)
 - Kerukunan antar organisasi keagamaan (kuadran B)
 - Pelestarian organisasi seni dan kebudayaan (kuadran B)
 - Pengelolaan pengaduan masyarakat (kuadran C)
 - Ketersediaan WiFi di tempat publik (kuadran C)
 - Tata Kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, akuntabilitas dan transparansi (kuadran C)
 - Penyediaan *open data* (kuadran C)
 - Pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat (kuadran C)
 - Pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan (kuadran C)
 - Pelayanan administrasi yang mudah diakses masyarakat (kuadran D)

Acknowledge

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden penelitian dan juga pihak Pemerintah Kota Bogor melalui Pemerintah Kecamatan Bogor Tengah dan beberapa Perangkat Daerah yang telah menjadi narasumber dalam penelitian.

Daftar Pustaka

- [1] M. P. Ortiz, D. R. Bennett, and D. P.-B. Yabar, *Sustainable Smart Cities. Creating Spaces for Technological, Social and Business Development*, vol. 6, no. 12. 2018.
- [2] F. Anindra, S. H. Supangkat, and R. R. Kosala, "Smart Governance as Smart City Critical Success Factor (Case in 15 Cities in Indonesia)," *Proceeding - 2018 Int. Conf. ICT Smart Soc. Innov. Towar. Smart Soc. Soc. 5.0, ICISS 2018*, no. October, 2018, doi: 10.1109/ICTSS.2018.8549923.
- [3] Diskominfo Kota Bogor, *Buku 2 Masterplan Smart City Kota Bogor 2017*. 2017.
- [4] A. Shabrinawati and N. Yuliasuti, "Komponen Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village," *J. PIKOM (Penelitian Komun. dan Pembangunan)*, vol. 21, no. 2, p. 141, 2020, doi: 10.31346/jpikom.v21i2.3020.
- [5] Annisah, "USULAN PERENCANAAN SMART CITY : SMART GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO," *J. Masy. Telemat. dan Inf.*, vol. 8 No.1, pp. 59–80, 2017.
- [6] S. Eniyati, R. C. N. Santi, R. Retnowati, S. Mulyani, and K. Martha, "Perhitungan Tingkat Kesiapan Implementasi Smart City Dalam Perspektif Smart Governance Dengan Metode Fis Mamdani," *J. Din.*, vol. 22, no. 1, pp. 39–48, 2017, doi: 10.35315/dinamik.v22i1.7104.
- [7] A. Herdiyanti, P. S. Hapsari, and T. D. Susanto, "Modelling the smart governance performance to support smart city program in Indonesia," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 161, pp. 367–377, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.11.135.
- [8] D. V. Alaydrus and I. H. Agustina, "Kepuasan Pengendara Motor terhadap Penggunaan Smart System Parking di Ruas Jalan Braga," pp. 54–60, 2022.